

Judul : Reshuffle Untuk Citra Pemerintah Jokowi
Tanggal : Rabu, 08 Mei 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Reshuffle Untuk Citra Pemerintahan Jokowi

Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Politik

TANGGAL 19 Mei 2014 bakal calon presiden Joko Widodo bersama bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla menggelar acara deklarasi pasangan tersebut di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta. Pasangan tersebut diusung oleh 4 (empat) partai politik, yaitu PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura. Bersamaan dengan deklarasi balon capres dan cawapres, Jokowi dan Jusuf Kalla juga mengumumkan "Nawa Cita" sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK jika mereka terpilih dalam Pemilu 2014.

Cita ke-2 menyatakan tekad Jokowi dan JK untuk "membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya." Pada Cita yang ke-4, Jokowi-JK menyatakan ketegasannya untuk "menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya." Sebelumnya, Jokowi berulang-ulang menyatakan janjinya kepada rakyat Indonesia untuk membentuk kabinet yang bersih dan efektif, jika terpilih sebagai Presiden.

Janji serupa juga diutarakan oleh Pak SBY ketika maju lagi dalam Pemilu 2009. "Kabinet saya mendatang bisa langsung bekerja efektif pada hari pertama!" ucap Presiden SBY dengan nada penuh keyakinan.

Di seantero dunia, politisi memang suka jual "kecap" Pemerintahan SBY jilid-2 ternyata "rusak". Motto sentral "anti korupsi", ternyata hanya janji kosong. Satu per satu petinggi Partai Demokrat, baik yang duduk di kabinet maupun di DPR-RI, dijebloskan KPK ke dalam sel tahanan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintahan Jokowi-JK pun diragukan komitmennya yang 1000% dalam melawan korupsi. Ketika KPK digoyang-goyang oleh pihak-pihak tertentu, terutama oleh sejumlah anggota DPR-RI dengan mendesak agar kewenangan sadap KPK dipangkas, pemerintah Jokowi terkesan tidak membela KPK. Padahal semua orang tahu "sadap" merupakan senjata pamungkas KPK. Lembaga anti-korupsi itu akan collapse manakala kewenangan sadap dicabut dari tubuh KPK.

Pemerintah Jokowi juga bersikap "dingin" ketika Komisi III DPR-RI mengulirkan Pansus Hak Angket KPK di penghujung 2017. Misi Angket KPK ketika itu ditengarai untuk melemahkan kedudukan KPK. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivritri Susanti, di masa lalu juga ada indikasi serupa. Ketika KPK sedang mengungkap kasus besar yang melibatkan politisi, baik di DPR maupun di parpol-parpol eksekutif, biasanya ada serangan balik seperti ini. Menjelang pembentukan Hak Angket, KPK memang melancarkan serangan



keras ke DPR terkait kasus e-KTP yang mengejutkan gedung DPR.

Sementara itu, independensi KPK masih sering menjadi diskursus banyak pihak. Apa betul KPK independen dan bersih? Banyak yang tidak percaya. Sejumlah kasus dugaan korupsi yang semula "meledak" dan mendapat perhatian besar dari publik, ternyata, kemudian "hilang". Kenapa hilang? Ya, itulah salah satu indikasi keraguan publik terhadap independensi KPK.

Saat ini keseriusan pemerintah Jokowi untuk "membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya" juga sedang mendapat ujian serius. Aroma korupsi di kabinet sudah merebak. Beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pada era Jokowi

sudah berurusan dengan KPK, yang terakhir adalah proyek pembangunan PLTU Riau 1 yang menelan korban salah satu menteri Jokowi dan seorang petinggi Senayan. Direktur Utama PLN pun sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Paling tidak ada 3 (tiga) menteri kabinet Jokowi yang kini disebut-sebut "terseret" dalam kubangan korupsi.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan Bappalistarto Lukita. Menpora ditengarai terlibat dalam kasus dana hibah milaran rupiah Kementerian kepada KONI Pusat. Pernyataannya bahwa ia tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Deputi Menteri terasa aneh. Menteri Agama "terseret" kasus jual-beli jabatan yang membawa Ketua Umum PPP Romahurmuziy pada status tersangka. Ada sejumlah uang di laci ruang kerja Menag ketika ruangan itu "diseruduk" petugas KPK, meski dalam jumlah "kecil". Ruang kerja Menpora, Menag dan Mendag, bahkan, sudah digeladahi oleh para petugas KPK. Hal itu indikasi seriusnya KPK mendalami kemungkinan keterlibatan ketiga menteri tsb. dalam kasus korupsi/suap.

Sebetulnya, masih ada satu menteri lagi yang bisa dikategorikan melakukan tindakan tidak etis, bukan tindakan korupsi. Hal ini terkait dengan kasus suap Meikarta. Ketika diadili di Pengadilan Tipikor Bandung, Bupati Bekasi, Neneng, mengaku pernah mendapat telepon dari seorang menteri yang memintanya "membantu perizinan mega-proyek Meikarta." Aneh kan? Apa hubungan sang Menteri dengan proyek swasta? Kenapa bukan Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat yang dimintakan informasi? Bukankah Wagub Jawa Barat ketika itu ulang-ulang mengatakan kepada media bahwa Meikarta belum dapat izin tapi pembangunannya sudah dilakukan? Ternyata, kasus Meikarta sudah menyambar korban terpidana juga.

Tentu, semua pihak harus menghormati azas Praduga Tak Bersalah. Namun, ketika seorang menteri jadi incaran serius KPK, bahkan kantor dan rumah tinggalnya digeladahi petugas KPK, ketika itu juga integritas menteri yang bersangkutan melorot. Ketika itu juga Presiden sebagai atasan langsung Menteri harus bertanya bagaimana sesungguhnya integritas menteri-menteri yang bersangkutan?

Indonesia memang tidak bisa disamakan dengan Jepang atau Korea Selatan, bahkan Amerika. Di negara-negara itu, seorang menteri biasanya cepat meletakkan jabatannya takala mendapat sorotan tajam dari publik karena ada dugaan melakukan tindak korupsi. Budaya malu amat kental bagi bangsa Jepang dan Korea. Bagi orang Jepang dan Korea, lebih terhormat mengundurkan diri daripada

terus mendapat sorotan tajam dari publik. Di negara kita, beberapa petinggi pemerintah balik bertanya "Kenapa saya harus mundur? Wong, yang mengangkat saya tidak menyuruh saya mundur?!" Kenapa saya harus mundur? Saya mengaku salah, padahal hukum belum membuktikan saya salah...

Dengan dalih serupa, pembantu Presiden Jokowi juga berkilah Jokowi menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengganti Idrus Marham sebagai Menteri Sosial ketika Mensos mengundurkan diri. Sikap "bertindak setelah menteri yang bermasalah mundur", menurut hemat kita, bukan sikap yang mencerminkan anti-korupsi, tetapi sikap aman-aman saja, setidaknya sikap yang meragukan tekad Presiden untuk sungguh-sungguh membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Maka, pendapat seperti itu sama dengan "bisikan racun" yang justru dapat menjatuhkan integritas Jokowi!

Jokowi jangan lupa bahwa ia mengemban misi lebih berat jika Tuhan merestuinnya memimpin Indonesia untuk 5 tahun lagi. Misi tsb. adalah mengamankan partai-partai koalisinya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pada periode 2024-2029. Jokowi harus mengakhiri kepemimpinannya pada 2024 sesuai ketentuan konstitusi. Pada saat itu akan terjadi lagi "pertempuran dah-

syat" untuk merebut kursi RI-1. Pimpinan partai-partai koalisi Jokowi -- terutama PDIP, Golkar dan Nasdem -- tentu sekarang sudah berikhtiar untuk incar kursi RI-1 pada Pemilu 2024. Sebaliknya, partai-partai oposisi sejak Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019 pun sudah menyusun strategi jitu untuk melumpuhkan "kubu Jokowi". Motto mereka: Berjuang kembali dan harus menang pada 2024!

Salah satu warisan (legacy) yang bisa diturunkan Jokowi kepada teman-teman seperjuangannya untuk mengamankan politik 2014 adalah sungguh-sungguh mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat (Cita ke-5). Sejarah berbicara nyata. Perolehan suara Partai Demokrat anjlok pada Pemilu 2014 karena citranya yang buruk sepanjang kepemimpinan SBY 2009-2014. Partai Kim Young Sam kalah telak dalam pemilu di Korea Selatan karena puteranya, Kim Hyun-chul, terbukti terlibat skandal korupsi senilai USD 7 juta dan divonis 3 tahun penjara. Kim Dae-yung dieluk-elukkan mayoritas rakyat dengan mulus memenangkan pemilu karena "bendara anti-korupsi" yang dikibarkan tinggi-tinggi.

Untuk itu, Presiden Jokowi sebaiknya segera merombak kabinetnya, sekaligus member-sihkan kabinetnya dari segala aroma busuk yang menyerupai korupsi! ***